



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
UNIT KERJA : ANGGOTA BIDANG PENGUSAHAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : BINSAR OKTAVIDWIN TAMBUNAN
2. Jabatan : DIREKTUR BADAN USAHA FASILITAS DAN LINGKUNGAN
3. NHK : 788679

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 3.500.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/136 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 162 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 200.000.000

1. MOBIL, HONDA ACCORD Tahun 1997, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
2. MOBIL, HONDA ODYSSEY Tahun 2001, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
3. MOBIL, MAZDA MAZDA2 Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
4. MOBIL, BMW BMW520 Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 25.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 1.760.000.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. 410.070.200

Sub Total Rp. 5.895.070.200

III. HUTANG Rp. ----



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

5.895.070.200

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.